BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "Oor Logs-Overgangs Blasting" (Pajak Penghasilan).

Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih dididuki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah mrnjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu :

1. Kelompok Cooperative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok Non-Cooperative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergeriliya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer II, Kantor Inpeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inpeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inpeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inpeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inpeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inpeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.
2. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inpeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dan dengan berlakunya keputusan menteri tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inpeksi Pajak Bandung Barat

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK/MK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

KPP Pratama Cimahi adalah KPP baru yang diantaranya KPP Pratama dimana KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan penyelidikan yang semula memiliki kantor yang terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pemecahan KPP Cimahi ke dalam 3 wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Cimahi KPP tersebut semuanya adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang Perpajakan dengan pelayanan kelas dunia dengan penerapan sistem administrasi modern, serta berusaha menerapkan trisukses yaitu sukses data, sukses pelayanan, dan sukses penerimaan, dalam mendukung tercapainya sasaran ”Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan Dalam Negeri dari Sektor Pajak Sehingga Dapat Tercapainya Target Tax Ratio 19% Sampai Dengan Tahun 2009” dan mengamankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh APBN.

Karakteristik dari KPP Pratama (Small Taxpayers Office) yang telah mengalami modernisasi antara lain :

1. KPP Pratama merupakan penggabungan dari tiga unit kantor (KPP, KPPPB, dan Karipka).
2. Struktur organisasi sama dengan struktur organisasi KPP WP Besar, dengan penambahan satu seksi yaitu seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang digunakan merupakan penggabungan SIDJP dan SISMIOP.
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB, dan BPHTB)
5. Account Repesentative ditugaskan untuk mengawasi wilayah tertentu yang berada dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan.

Melalui modernisasi ini diharapkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak menjadi lebih efisien karena dilaksanakan di satu tempat dan juga diharapkan dengan modernisasi ini pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan sehingga dapat menunjang pembiayaan pembangunan.

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/OMK.01/2007.

Visi dan Misi

KPP Pratama Cimahi mempunyai visi dan misi diantaranya :

1. Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.” Menjadikan KPP Pratama Cimahi menjadi pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a. Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

b. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan yang minimizing distortioni.

c. Mendukung proses demokrayisasi bangsa.

d. Senantiasa memperbaharui diri, selararas dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Jenderal H. Amir Machmud No.574 Cimahi, terdiri dari 4 (empat) lantai masing-masing lantai ditempati oleh :

Lantai I : 1. Ruang Tempat Pelayanan Terpadu
2. Ruang Kerja Seksi Pelayanan
3. Ruang Kerja Seksi Pengolah Data dan Informasi

Lantai II : 1. Ruang Kerja Kepala Kantor
2. Ruang Rapat Kepala Kantor
3. Ruang Kerja Sub Bagian Umum
4. Ruang Aula
5. Ruang Dokter

Lantai III : 1. Ruang Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
2. Ruang Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

3. Ruang Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
4. Ruang Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

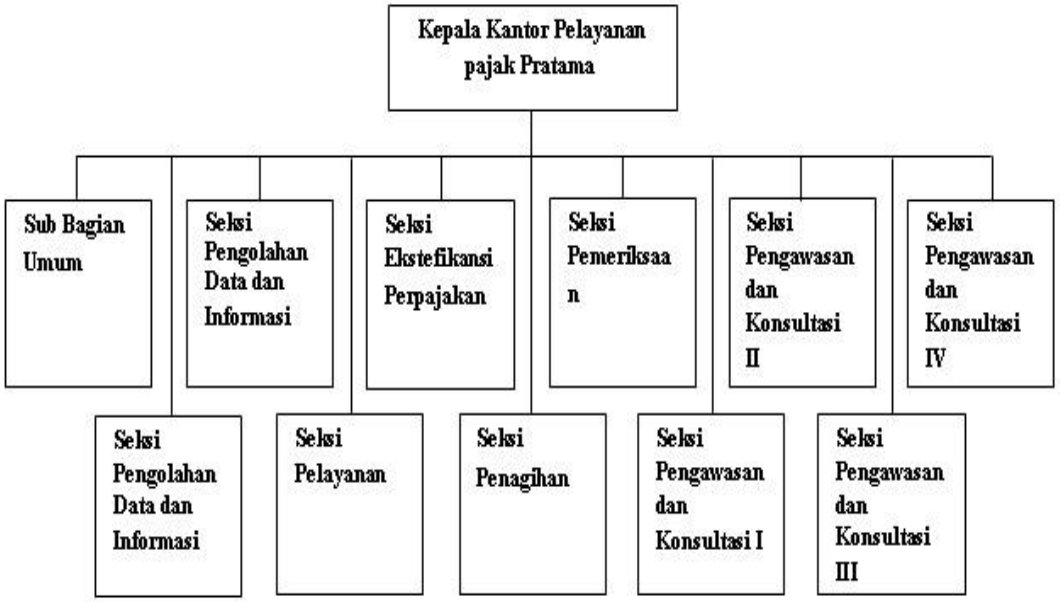
Lantai IV : 1. Ruang Kerja Seksi Penagihan
2. Ruang Kerja SeksiEkstensifikasi Perpajakan
3. Ruang Kerja Seksi Pemeriksaan
4. Ruang Kerja Kelompok Fungsional Pemeriksa

4.1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Struktur organisasi adalah merupakan suatu hal yang penting di KPP Pratama Cimahi, karena dengan adanya struktur dapat terlihat dengan jelas tanggung jawab seseorang pemangku jabatan di KPP Pratama Cimahi, sehingga dengan adanya tangung jawab yang jelas diharapkan dapat terciptanya kelancaran kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di KPP Pratama Cimahi.

Struktur organisasi dibuat sebagai landasan agar masing-masing elemen didalam sebuah perusahaan dapat berperan sesuai dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Struktur organisasi juga mencerminkan adanya keteraturan kinerja pegawai atau karyawan dimana satu sama lain saling berhubungan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang terencana, terarah, dan teratur.

Struktur Organisasi KPP Pratama Cimahi



Sumber: KPP Pratama Cimahi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Cimahi

4.1.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

KPP Pratama Cimahi terdiri atas unit kerja. Adapun tugas pokok dari setiap unit kerja yang ada di KPP Pratama Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Kepala KPP Pratama

   Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan pada KPP Pratama.

2. Sub Bagian Umum

   Membantu Kepala KPP Pratama dalam mengurus urusan rumah tangga KPP Pratama seperti administrasi, surat menyurat, gaji pegawai, dan lainnya. Sub Bagian Umum terdiri dari :

   a. Kepegawaian.

   b. Keuangan.

c. Tata Usaha.

d. Rumah Tangga.

3. Seksi Pengolahan Data Informasi

Merupakan jantung dari KPP Pratama karena merupakan pusat perekaman data dari SPT yang disampaikan Wajib Pajak.

4. Seksi Pelayanan

Merupakan ujung tombak KPP Pratama yang bertugas untuk melayani Wajib Pajak. Tugas Seksi Pelayanan antara lain :

a. Menerbitkan produk hukum.

b. Administrasi dan penyimpanan berkas.

c. Penyuluhan perpajakan.

d. Penerimaan SPT dan surat-surat permohonan Wajib Pajak.

e. Penerbitan NPWP / NPPKP.

f. Menjawab konfirmasi.

5. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi antara lain :

a. Pengamatan potensi perpajakan.

b. Pendataan subjek dan objek pajak.

c. Penilaian objek pajak.

d. Penguasaan wilayah.

e. Pendataan monografi fiskal.

f. Ekstensifikasi wajib pajak.

6. Seksi Penagihan

   Bertugas untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak atas tunggakan pajaknya. Selain itu juga bertugas untuk melaksanakan penagihan aktif. Tugas Seksi Penagihan antara lain :

   a. Penata usahaan piutang pajak.
   b. Proses permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
   c. Penagihan aktif.

7. Seksi Pemeriksaan

   Tugas Seksi Pemeriksaan antara lain :

   a. Penyusunan rencana pemeriksaan.
   b. Pengawasan aturan pemeriksaan.
   c. Penerbitan dan penyaluran SP3.
   d. Administrasi pemeriksaan pajak.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, II, III, IV

   Terdiri atas para *Account Repesentatives* (AR) yang ditugaskan pada wilayah-wilayah tertentu. *Account Repesentatives* ini bertugas untuk mengawasi kewajiban Wajib Pajak, melayani penyelesaian hak Wajib Pajak dan sebagai tempat konsultasi Wajib Pajak. Jadi *Account Repesentatives* ini bertugas untuk menjembatani atau mediator antara Wajib Pajak dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain :

   a. Bimbingan atau himbauan terhadap Wajib Pajak.
   b. Konsultasi teknis perpajakan.
   c. Pengawasan perpajakan.

d. Analisis kepatuhan.

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi.

f. Penyusunan profile Wajib Pajak.

4.1.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan di bidang Pelayanan Perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
2. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
3. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
4. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan, dan restitusi PPh, PPN, dan PTLL.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Cimahi.
6. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

7. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.

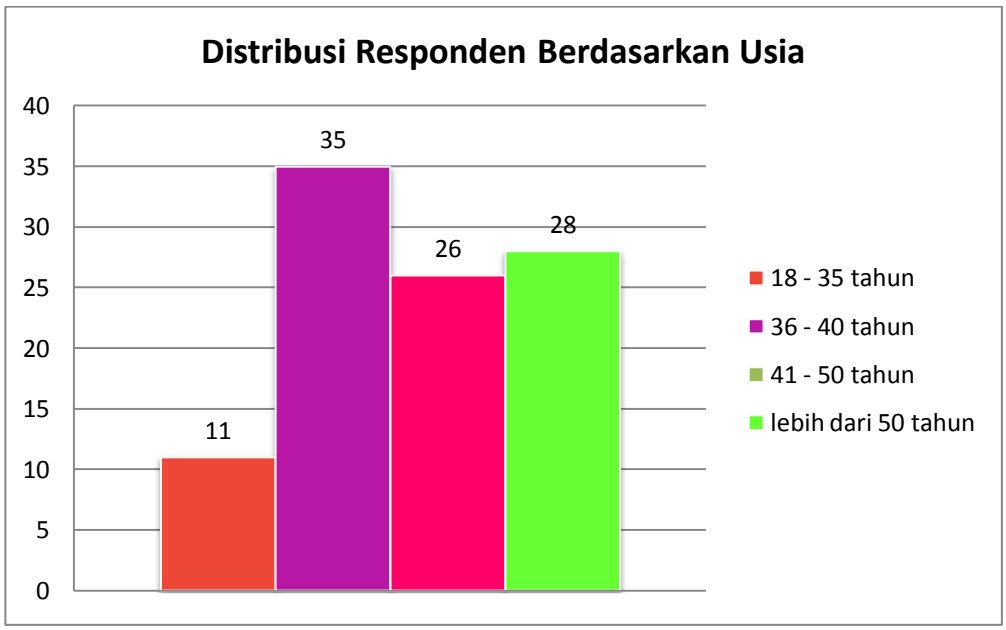
8. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan.

4.1.1.5 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak secara keseluruhan berjumlah sebanyak 100 orang. Pembagian kuesioner diberikan kepada wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak orang pribadi adalah orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan berbagai macam pekerjaan. Sehingga dikarenakan banyaknya jumlah orang pribadi sebagai wajib pajak yang terdapat pada suatu KPP, untuk itu wajib pajak orang pribadi dipilih sebagai responden pada penelitian ini. Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan Usia dapat dilihat pada grafik 4.1 sebagai berikut :

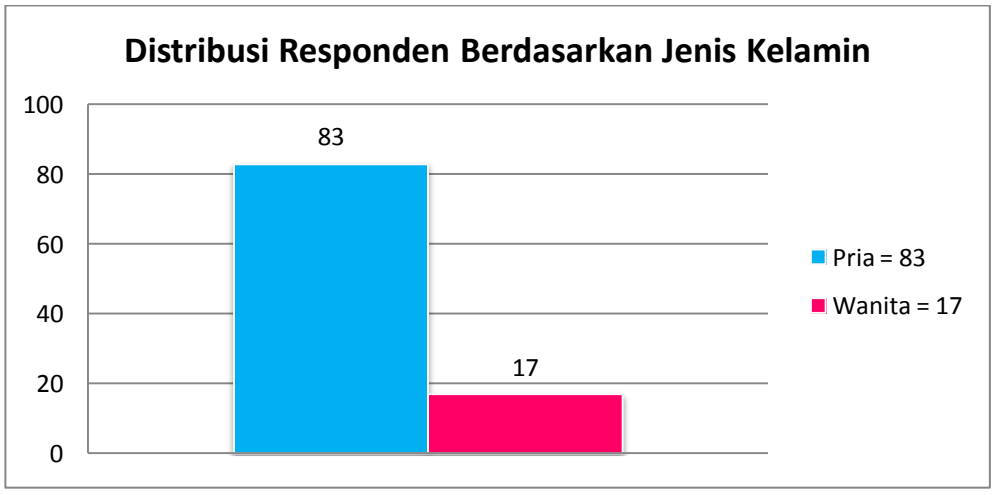


Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan pada grafik di atas terlihat bahwa paling banyak responden berusia antara 36-40 tahun, yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 35,0 persen. Disusul kemudian responden yang memiliki usia diatas 50 tahun yaitu sebanyak 28 responden atau sebesar 28,0 persen dari seluruh jumlah responden yang ada. Kemudian responden yang berusia antara 41-50 tahun ada 26 orang atau 26,0 persen. Sementara responden yang baru berusia antara 18-35 tahun hanya ada 11 orang atau sebesar 11,0 persen. Responden berdasarkan usia antara 36-40 tahun, paling banyak menjadi responden dalam pengisian kuesioner yang disebarkan pada KPP Cimahi. Hal ini dikarenakan usia 36-40 tahun, adalah usia yang dimana seseorang mempunyai pekerjaan tetap dan mapan secara penghasilan, sehingga penghasilan itu dikenakan pajak. Maka dari itu banyak yang berusia antara 36-40 tahun, yang terdapat pada KPP Pratama Cimahi dan menjadi responden dalam pengisian kuesioner.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 4.2 sebagai berikut :



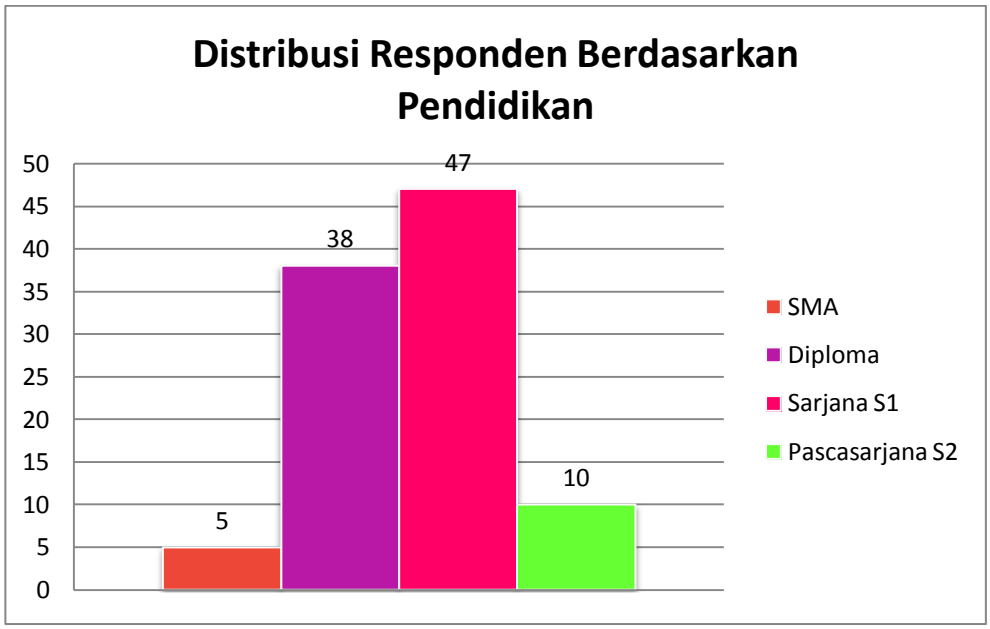
Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan pada grafik 4.2 dapat diketahui bahwa wajib pajak KPP Pratama Cimahi berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin Pria, yaitu sebanyak 83 orang atau sebesar 83,0 persen dari total responden. Kemudian 17 responden atau sebesar 17,0 persen berjenis kelamin Wanita. Sebagian besar responden berjenis kelamin pria, hal ini dikarenakan pria mempunyai kewajiban dituntut untuk bekerja daripada wanita. Dan juga pria lebih banyak ditemukan di KPP Pratama cimahi untuk mengurus administrasi perpajakan.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada grafik 4.3 sebagai berikut :

Grafik 4.3



Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan pendidikan terlihat bahwa jumlah responden terbesar berada pada tingkat pendidikan sarjana S1, yaitu sebanyak 47 responden atau sebesar 47,0 persen. Disusul kemudian responden pada kelompok pendidikan diploma yaitu sebanyak 38 orang atau sebesar 38,0 persen dari seluruh jumlah responden yang ada. Sementara responden yang berpendidikan pascasarana (S-2) hanya ada sebanyak 10 orang atau sebesar 10,0 persen dari total responden. Banyak responden berpendidikan S1, hal ini dikarenakan responden berpendidikan S1 secara pendidikan, banyak dicari dalam dunia kerja. Sehingga S1 dapat langsung bekerja, dan mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Selain itu, responden berpendidikan S1 juga lebih paham tentang perpajakan sehingga lebih sadar akan membayar dan melaporkan pajaknya.

4.1.2 Hasil Pengujian Alat Analisis

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 36 butir pernyataan dengan perincian 10 butir pernyataan mengenai *self assesment system*, 20 butir pernyataan mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan 6 butir pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.2.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum dianalisis, data hasil penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

4.1.2.1.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Seperti telah dijelaskan pada metodologi penelitian bahwa untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya $\geq$ 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan korelasi *product moment* (indeks validitas) diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

1) Hasil Uji Validitas Kuesioner *Self Assesment System*

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Kuesioner *Self Assesment System*

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 1	0,387	0,30	Valid
Item 2	0,424	0,30	Valid
Item 3	0,522	0,30	Valid
Item 4	0,314	0,30	Valid
Item 5	0,352	0,30	Valid
Item 6	0,498	0,30	Valid
Item 7	0,413	0,30	Valid
Item 8	0,460	0,30	Valid
Item 9	0,417	0,30	Valid

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 10	0,372	0,30	Valid

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel *self assesment system* valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2) Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tabel 4.2

Hasil uji validitas kuesioner sistem administrasi perpajakan modern

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 11	0,397	0,30	Valid
Item 12	0,421	0,30	Valid
Item 13	0,555	0,30	Valid
Item 14	0,511	0,30	Valid
Item 15	0,329	0,30	Valid
Item 16	0,329	0,30	Valid
Item 17	0,379	0,30	Valid
Item 18	0,358	0,30	Valid
Item 19	0,379	0,30	Valid
Item 20	0,426	0,30	Valid
Item 21	0,580	0,30	Valid
Item 22	0,511	0,30	Valid
Item 23	0,315	0,30	Valid
Item 24	0,313	0,30	Valid
Item 25	0,438	0,30	Valid
Item 26	0,401	0,30	Valid
Item 27	0,379	0,30	Valid
Item 28	0,392	0,30	Valid
Item 29	0,596	0,30	Valid
Item 30	0,490	0,30	Valid

Dari tabel 4.2 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3) Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	Indeks Validitas	Nilai Kritis	Keterangan
Item 31	0,480	0,30	Valid
Item 32	0,474	0,30	Valid
Item 33	0,518	0,30	Valid
Item 34	0,327	0,30	Valid
Item 35	0,432	0,30	Valid
Item 36	0,382	0,30	Valid

Dari tabel 4.3 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (indeks validitas) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai kritis 0.30. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.1.2.1.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Selain valid, alat ukur juga harus memiliki keandalan atau reliabilitas, suatu alat ukur dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak bebeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas. Apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70 maka

secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel). Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *split-half* diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

1) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner *Self Assesment System*

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner *Self assesment system*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.526
		N of Items	5[a]
	Part 2	Value	.515
		N of Items	5[b]
	Total N of Items		10
Correlation Between Forms			.817
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.900
	Unequal Length		.900
Guttman Split-Half Coefficient			.900

a. The items are: SAS.1, SAS.3, SAS.5, SAS.7, SAS.9.

b. The items are: SAS.2, SAS.4, SAS.6, SAS.8, SAS.10.

Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner *self assesment system* sebesar 0,900 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel *self assesment system* sudah memberikan hasil yang konsisten.

2) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tabel 4.5

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.756
		N of Items	10[a]
	Part 2	Value	.735
		N of Items	10[b]
	Total N of Items		20
Correlation Between Forms			.669
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.801
	Unequal Length		.801
Guttman Split-Half Coefficient			.801

a. The items are: Modernisasi.1, Modernisasi.3, Modernisasi.5, Modernisasi.7, Modernisasi.9, Modernisasi.11, Modernisasi.13, Modernisasi.15, Modernisasi.17, Modernisasi.19.

b. The items are: Modernisasi.2, Modernisasi.4, Modernisasi.6, Modernisasi.8, Modernisasi.10, Modernisasi.12, Modernisasi.14, Modernisasi.16, Modernisasi.18, Modernisasi.20.

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,801 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sistem administrasi perpajakan modern sudah memberikan hasil yang konsisten.

3) Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.583
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	.426
		N of Items	3[b]
	Total N of Items		6
Correlation Between Forms			.598
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.748
	Unequal Length		.748
Guttman Split-Half Coefficient			.747

a. The items are: Kepatuhan.1, Kepatuhan.3, Kepatuhan.5.

b. The items are: Kepatuhan.2, Kepatuhan.4, Kepatuhan.6.

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,748 (*Spearman-Brown Coefficient*) lebih besar dari nilai kritis 0.70. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan Wajib Pajak sudah memberikan hasil yang konsisten.

4.1.3 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan persentase skor tanggapan responden.

4.1.3.1 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Self assesment system pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. *Self assesment system* diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang *self assesment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai *Self Assesment System*

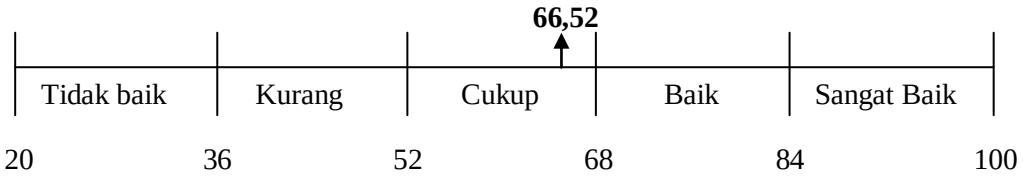
Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP	612	1000	61,20
Menghitung dan membayar sendiri	721	1000	72,10
Mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP	687	1000	68,70
Mengajukan surat keberatan dan banding	597	1000	59,70
Meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak	709	1000	70,90
Total	**3326**	**5000**	**66,52**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.7 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden seperti disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4.2

Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel *Self Assesment System*



Sumber: Umi Narimawati (2007:84)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel *self assesment system* sebesar 66,52 berada pada interval 52 – 68. Sedangkan sisanya sebesar 33,48 menunjukan belum optimalnya *Self Assessment System* sehingga penerapannya belum sangat baik, seperti yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *self assesment system*

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi secara umum berada dalam kategori cukup. Demikian juga bila dilihat berdasarkan indikator, persentase skor jawaban responden untuk indikator mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP dan mengajukan surat keberatan dan banding termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan persentase skor jawaban responden untuk indikator Menghitung dan membayar sendiri, kemudian mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP serta meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak termasuk dalam kategori baik.

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran *self assesment system* pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 4 (empat indikator) dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP

Tabel 4.8 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mendaftarkan Diri untuk Mendapat NPWP

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Prosedur untuk mendapatkan NPWP	F	7	19	34	33	7	286	500	57,20
		%	7,0	19,0	34,0	33,0	7,0			
2	Malas untuk mendaftarkan diri ke KPP	F	8	35	37	15	5	326	500	65,20
		%	8,0	35,0	37,0	15,0	5,0			
	Total Indikator							**612**	**1000**	**61,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP masih cukup. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 61,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Sesuai dengan fenomena yang ada pada Bab I, yang dikemukakan oleh Agus Martowardojo, mengatakan namun masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan *self assessment* dalam pembayaran pajak (Agus Martowardojo, 2012). Dan dilihat dari akumulasi jawaban responden pada total indikator, dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama cimahi masih cukup baik untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.8 diatas.

a) Prosedur untuk mendapatkan NPWP

   Pada tabel 4.8 untuk pernyataan "prosedur untuk mendapatkan NPWP" terlihat paling banyak responden menjawab biasa saja (skor 3), disusul responden yang menjawab sulit (skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 57,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya merasa prosedur untuk mendapatkan NPWP masih agak sulit.

b) Malas untuk mendaftarkan diri ke KPP

Pada tabel 4.8 untuk pernyataan "Prosedur dalam mendapatkan NPWP, membuat Ibu/Bapak menjadi malas untuk mendaftarkan diri ke KPP" terlihat paling banyak responden menjawab cukup setuju (skor 3), disusul responden yang menjawab tidak setuju (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 65,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi malas untuk mendaftarkan diri ke KPP karena prosedur dalam mendapatkan NPWP yang agak sulit.

2. Menghitung dan membayar sendiri

Tabel 4.9 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator menghitung dan membayar sendiri.

Tabel 4.9

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Menghitung dan membayar sendiri

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Pemahaman tentang cara perhitungan pajak terutang pph orang pribadi	F	23	32	24	17	4	353	500	70,60
		%	23,0	32,0	24,0	17,0	4,0			
4	Tarif tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	F	30	31	19	17	3	368	500	73,60
		%	30,0	31,0	19,0	17,0	3,0			
	Total Indikator							**721**	**1000**	**72,10**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa kesadarna Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang sudah baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 72,10 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut ini adalah

uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.9 diatas.

a) Pemahaman tentang cara perhitungan pajak terutang pph orang pribadi

   Pada tabel 4.9 untuk pernyataan "Pemahaman tentang cara perhitungan pajak terutang pph orang pribadi" terlihat paling banyak responden menjawab paham (skor 4), disusul responden yang menjawab cukup paham (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 70,60 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya paham tentang cara perhitungan pajak terutang pph orang pribadi.

b) Tarif tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

   Pada tabel 4.9 untuk pernyataan "Tarif tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi" terlihat paling banyak responden menjawab 30% (skor 4), disusul responden yang menjawab 25% (skor 5). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 73,60 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya tahu tarif tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP

Tabel 4.10 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP.

Tabel 4.10

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Menyampaikan atau melaporkan SPT masa PPh ke KPP	F	18	33	35	13	1	354	500	70,80
		%	18,0	33,0	35,0	13,0	1,0			
6	Tanggal batas Pelaporan SPT Tahunan pajak Penghasilan Orang Pribadi	F	7	38	37	17	1	333	500	66,60
		%	7,0	38,0	37,0	17,0	1,0			
	Total Indikator							**687**	**1000**	**68,70**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa kesediaan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk mengambil SPT, mengisi dengan benar sendiri ke KPP sudah tinggi. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 68,70 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori tinggi. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.10 diatas.

a) Menyampaikan atau melaporkan SPT masa PPh ke KPP

Pada tabel 4.10 untuk pernyataan "Menyampaikan atau melaporkan SPT masa PPh ke KPP" terlihat paling banyak responden menjawab 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo (skor 3), disusul responden yang menjawab 15 hari sebelum tanggal jatuh tempo (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 70,80 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya telah menyampaikan atau melaporkan SPT masa PPh ke KPP.

b) Tanggal batas Pelaporan SPT Tahunan pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada tabel 4.10 untuk pernyataan "Tanggal batas Pelaporan SPT Tahunan pajak Penghasilan Orang Pribadi" terlihat paling banyak responden menjawab 20 maret (skor 4), disusul responden yang menjawab 21 maret (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 66,60 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya belum tahu tanggal batas Pelaporan SPT Tahunan pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4. Mengajukan surat keberatan dan banding

Tabel 4.11 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mengajukan surat keberatan dan banding.

Tabel 4.11

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mengajukan surat keberatan dan banding

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Bagaimana Pegawai Pajak dalam memproses Keberatan dan Banding	F	12	16	41	27	4	305	500	61,00
		%	12,0	16,0	41,0	27,0	4,0			
8	Pernahkah mengajukan Surat Keberatan atau Banding dari kesalahan pembayaran pajak	F	5	23	35	33	4	292	500	58,40
		%	5,0	23,0	35,0	33,0	4,0			
	Total Indikator							**597**	**1000**	**59,70**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi jarang mengajukan surat keberatan dan banding. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 59,70 berada pada interval 52 – 68

dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.11 diatas.

a) Proses Keberatan dan Banding

   Pada tabel 4.11 untuk pernyataan "Bagaimana Pegawai Pajak dalam memproses Keberatan dan Banding" terlihat paling banyak responden menjawab biasa saja (skor 3), disusul responden yang menjawab lambat (skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 61,0 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi merasa pegawai pajak masih lambat dalam memproses Keberatan dan Banding.

b) Mengajukan Surat Keberatan atau Banding dari kesalahan pembayaran pajak

   Pada tabel 4.11 untuk pernyataan "Pernah mengajukan Surat Keberatan atau Banding dari kesalahan pembayaran pajak" terlihat paling banyak responden menjawab ragu-ragu (skor 3), disusul responden yang menjawab tidak pernah (skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 58,40 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih jarang mengajukan Surat Keberatan atau Banding dari kesalahan pembayaran pajak.

5. Meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak

Tabel 4.12 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

Tabel 4.12

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Kelebihan membayar pajak, karena salah perhitungan	F	15	29	43	11	2	344	500	68,80
		%	15,0	29,0	43,0	11,0	2,0			
10	Proses restitusi yang ada	F	19	47	17	14	3	365	500	73,00
		%	19,0	47,0	17,0	14,0	3,0			
	Total Indikator							**709**	**1000**	**70,90**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sering meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 70,90 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori tinggi. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.12 diatas.

a) Kelebihan membayar pajak

Pada tabel 4.12 untuk pernyataan "Kelebihan membayar pajak, karena salah perhitungan" terlihat paling banyak responden menjawab ragu-ragu (skor 3), disusul responden yang menjawab pernah beberapa kali (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 68,80 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori tinggi, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya pernah kelebihan membayar pajak, karena salah perhitungan.

b) Proses restitusi yang ada

Pada tabel 4.12 untuk pernyataan "Proses restitusi yang ada" terlihat paling banyak responden menjawab tidak sulit dan tidak rumit (skor 4), disusul

responden yang menjawab mudah (skor 5). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 73,0 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori tinggi, artinya Wajib Pajak pada umumnya mudah melakukan proses restitusi yang ada.

4.1.3.2 Analisis Deskriptif Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Sistem administrasi perpajakan modern diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 20 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem administrasi perpajakan modern

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan	578	1000	57,80
Jalur Pengawasan Tugas Pelayanan dan Pemeriksaan	702	1000	70,20
Perubahan Metode Pelayanan dan Pemeriksaan	672	1000	67,20
Penyederhanaan Prosedur Administrasi	616	1000	61,60
Penggunaan Teknologi Informasi	682	1000	68,20
Adanya Sosialisasi melalui media elektronik dan cetak	702	1000	70,20
Pemberian Pelayanan yang Optimal	672	1000	67,20
Fasilitas Sarana dan Prasarana	616	1000	61,60
Kode Etik Pegawai DJP	682	1000	68,20
Komitmen Pegawai	702	1000	70,20

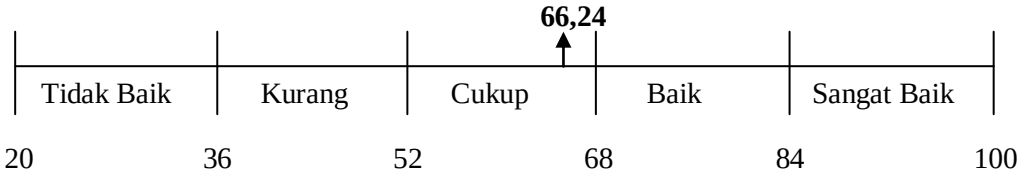
Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Total	**6624**	**10000**	**66,24**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.13 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3

Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Sistem administrasi perpajakan modern



Sumber: Umi Narimawati (2007:84)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 66,24 berada pada interval 52 – 68. Sedangkan sisanya sebesar 33,76 menunjukan belum optimalnya Sistem Administrasi Perpajakan Modern sehingga penerapannya belum sangat baik, seperti yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi secara umum masih cukup baik. Bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden untuk sebagian indikator termasuk dalam kategori cukup, namun persentase skor tanggapan responden untuk sebagian indikator termasuk dalam kategori baik.

Agar lebih jelas maka penulis juga menyajikan gambaran sistem administrasi perpajakan modern pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 20

butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan

Tabel 4.14 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada KPP Pratama Cimahi	F	3	19	34	35	9	272	500	54,40
		%	3,0	19,0	34,0	35,0	9,0			
2	prosedur pemeriksaan yang ada	F	6	25	42	23	4	306	500	61,20
		%	6,0	25,0	42,0	23,0	4,0			
	Total Indikator							**578**	**1000**	**57,80**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 57,80 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.14 diatas.

a) Fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada KPP Pratama Cimahi

Pada tabel 4.14 untuk pernyataan "bagaimana fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab tidak baik (skor 2), disusul responden yang menjawab cukup (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 54,40 berada pada

interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada KPP Pratama Cimahi masih cukup baik.

b) Prosedur pemeriksaan yang ada

Pada tabel 4.14 untuk pernyataan "prosedur pemeriksaan yang ada pada KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab cukup sesuai (skor 3), disusul responden yang menjawab sesuai (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 61,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai prosedur pemeriksaan yang ada pada KPP Pratama Cimahi masih cukup sesuai.

2. Jalur Pengawasan Tugas Pelayanan dan Pemeriksaan

Tabel 4.15 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan.

Tabel 4.15

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Jalur Pengawasan Tugas Pelayanan dan Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	jalur pengawasan tugas yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi	F	17	37	24	21	1	348	500	69,60
		%	17,0	37,0	24,0	21,0	1,0			
4	pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang ada	F	30	24	25	12	9	354	500	70,80
		%	30,0	24,0	25,0	12,0	9,0			
	Total Indikator							**702**	**1000**	**70,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi sudah baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 70,80 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.15 diatas.

a) Jalur pengawasan tugas yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi

   Pada tabel 4.15 untuk pernyataan "bagaimana jalur pengawasan tugas yang dilakukan di KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab cukup pengawasan tugas yang dilakukan (skor 4), disusul responden yang menjawab cukup pengawasan tugas yang dilakukan (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 69,60 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai jalur pengawasan tugas yang dilakukan KPP sudah baik.

b) Pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang ada

   Pada tabel 4.15 untuk pernyataan "bagaimana pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab sangat baik (skor 5), disusul responden yang menjawab cukup (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 70,80 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang ada di KPP sudah baik.

3. Perubahan Metode Pelayanan dan Pemeriksaan

Tabel 4.16 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Perubahan Metode Pelayanan dan Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern	F	25	23	21	30	1	341	500	68,20
		%	25,0	23,0	21,0	30,0	1,0			
6	perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap administrasi perpajakan	F	13	33	33	14	7	331	500	66,20
		%	13,0	33,0	33,0	14,0	7,0			
	Total Indikator							**672**	**1000**	**67,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 67,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.16 diatas.

a) Metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern

Pada tabel 4.16 untuk pernyataan “Setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern, bagaimana metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada” terlihat paling banyak responden menjawab menjadi tidak baik (skor 2), disusul responden yang menjawab menjadi sangat baik (skor 5). Kemudian

persentase skor tanggapan responden sebesar 68,20 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada menjadi lebih baik setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern.

b) Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap administrasi perpajakan

Pada tabel 4.16 untuk pernyataan "apakah perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap administrasi perpajakan" terlihat paling banyak responden menjawab biasa saja (skor 3), disusul responden yang menjawab cukup berpengaruh (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 66,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori kuirang, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan cukup berpengaruh terhadap administrasi perpajakan.

4. Penyederhanaan Prosedur Administrasi

Tabel 4.17 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan.

Tabel 4.17

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penyederhanaan Prosedur Administrasi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	prosedur administrasi perpajakan yang ada	F	10	30	32	22	6	316	500	63,20
		%	10,0	30,0	32,0	22,0	6,0			

8	kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakan	F	16	15	26	39	4	300	500	60,00
		%	16,0	15,0	26,0	39,0	4,0			
	Total Indikator							**616**	**1000**	**61,60**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa penyederhanaan prosedur administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 61,60 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.17 diatas.

a) Prosedur administrasi perpajakan yang ada

   Pada tabel 4.17 untuk pernyataan "Bagaimana prosedur administrasi perpajakan yang ada" terlihat paling banyak responden menjawab cukup mudah (skor 3), disusul responden yang menjawab mudah (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 63,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai prosedur administrasi perpajakan yang ada masih cukup baik.

b) Kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakan

   Pada tabel 4.17 untuk pernyataan "mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakan" terlihat paling banyak responden menjawab mengalami kesulitan (skor 2), disusul responden yang menjawab cukup mengalami kesulitan (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 60,0 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup,

artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi

Tabel 4.18 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penggunaan teknologi informasi.

Tabel 4.18

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penggunaan Teknologi Informasi

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	teknologi dan informasi yang ada dalam sistem administrasi perpajakan modern membantu mempercepat proses pelayanan	F	7	29	45	18	1	323	500	64,60
		%	7,0	29,0	45,0	18,0	1,0			
10	penggunaan teknologi dan informasi pada KPP Pratama Cimahi	F	16	44	25	13	2	359	500	71,80
		%	16,0	44,0	25,0	13,0	2,0			
	Total Indikator							**682**	**1000**	**68,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 68,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.18 diatas.

a) Teknologi dan Informasi yang ada dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pada tabel 4.18 untuk pernyataan “teknologi dan informasi yang ada dalam sistem administrasi perpajakan modern membantu mempercepat proses

pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak" terlihat paling banyak responden menjawab cukup membantu (skor 3), disusul responden yang menjawab membantu (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 64,60 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai teknologi dan informasi yang ada dalam sistem administrasi perpajakan modern cukup membantu mempercepat proses pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak.

b) Penggunaan teknologi dan informasi pada KPP Pratama Cimahi

Pada tabel 4.18 untuk pernyataan "penggunaan teknologi dan informasi pada KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab cdipergunakan dengan baik (skor 4),disusul responden yang menjawab cukup dipergunakan dengan baik (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 71,80 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai penggunaan teknologi dan informasi pada KPP Pratama Cimahi, sudah dipergunakan dengan baik.

6. Sosialisasi melalui media elektronik dan cetak

Tabel 4.19 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator sosialisasi melalui media elektronik dan cetak.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Adanya Sosialisasi melalui media elektronik dan cetak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	sosialisasi yang ada pada media elektronik dan cetak memberikan Ibu/Bapak pemahaman tentang administrasi perpajakan	F	17	37	24	21	1	348	500	69,60
		%	17,0	37,0	24,0	21,0	1,0			
12	sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dalam administrasi perpajakan	F	30	24	25	12	9	354	500	70,80
		%	30,0	24,0	25,0	12,0	9,0			
	Total Indikator							**702**	**1000**	**70,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa Sosialisasi melalui media elektronik dan cetak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 70,20 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.19 diatas.

a) Sosialisasi yang ada pada media elektronik dan cetak memberikan Ibu/Bapak pemahaman tentang administrasi perpajakan

   Pada tabel 4.19 untuk pernyataan "sosialisasi yang ada pada media elektronik dan cetak memberikan Ibu/Bapak pemahaman tentang administrasi perpajakan" terlihat paling banyak responden menjawab cukup menjadi paham (skor 4), disusul responden yang menjawab biasa saja (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 69,60 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya sosialisasi yang ada pada media

elektronik dan cetak memberikan Ibu/Bapak pemahaman tentang administrasi perpajakan cukup membuat wajib pajak paham tentang perpajakan.

b) Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dalam administrasi perpajakan

Pada tabel 4.19 untuk pernyataan "Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dalam administrasi perpajakan" terlihat paling banyak responden menjawab sangat berpengaruh (skor 5), disusul responden yang menjawab cukup berpengaruh (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 70,80 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dalam administrasi perpajakan sangat mempengaruhi administrasi perpajakan.

7. Pelayanan yang Optimal

Tabel 4.20 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pelayanan yang optimal.

Tabel 4.20

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pemberian Pelayanan yang Optimal

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
13	Petugas pajak memberikan pelayanan optimal dan prima	F	25	23	21	30	1	341	500	68,20
		%	25,0	23,0	21,0	30,0	1,0			
14	Pemberian pelayanan yang optimal telah dilakukan pada KPP Pratama Cimahi	F	13	33	33	14	7	331	500	66,20
		%	13,0	33,0	33,0	14,0	7,0			
	Total Indikator							**672**	**1000**	**67,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 67,20 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup. Sesuai dengan fenomena yang ada pada Bab I, yang dikemukan I Gusti Ngurah Mayun (2009) yang mengatakan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, tambahnya, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada, tapi itu semua merupakan hal yang wajar, kewajiban kami untuk segera menanggapinya dengan senyuman. Dan melalui akumulasi jawaban responden, dapat diketahui bahwa wajib pajak KPP Pratama cimahi menilai bahwa pelayanan yang diberikanpun masih cukup baik. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.20 diatas.

a) Petugas pajak memberikan pelayanan optimal dan prima

   Pada tabel 4.20 untuk pernyataan "Petugas pajak memberikan pelayanan optimal dan prima" terlihat paling banyak responden menjawab biasa saja (skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 68,20 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai petugas pajak cukup baik memberikan pelayanan optimal dan prima kepada wajib pajak.

b) Pemberian pelayanan yang optimal telah dilakukan pada KPP Pratama Cimahi

Pada tabel 4.19 untuk pernyataan "Pemberian pelayanan yang optimal telah dilakukan pada KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab setuju (skor 4) dan cukup setuju (skor 3), jumlah yang sama. Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 66,20 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai pelayanan yang diberikan cukup optimal.

8. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Tabel 4.21 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator fasilitas Sarana dan Prasarana.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Fasilitas Sarana dan Prasarana

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
15	sarana dan prasarana yang ada pada KPP Pratama Cimahi	F	10	30	32	22	6	316	500	63,20
		%	10,0	30,0	32,0	22,0	6,0			
16	fasilitas sarana dan prasana modern yang ada	F	16	15	26	39	4	300	500	60,00
		%	16,0	15,0	26,0	39,0	4,0			
	Total Indikator							**616**	**1000**	**61,60**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 61,60 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.21 diatas.

a) Sarana dan prasarana yang ada pada KPP Pratama Cimahi

Pada tabel 4.21 untuk pernyataan "Sarana dan prasarana yang ada pada KPP Pratama Cimahi" terlihat paling banyak responden menjawab cukup menjadi cukup menunjang (skor 3), disusul responden yang menjawab baik menunjang (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 63,20 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai sarana dan prasarana yang ada, cukup menunjang administrasi perpajakan.

b) Fasilitas sarana dan prasarana modern yang ada

Pada tabel 4.21 untuk pernyataan "Fasilitas sarana dan prasarana modern yang ada" terlihat paling banyak responden menjawab tidak membantu (skor 4), disusul responden yang menjawab cukup membantu (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 60,00 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai fasilitas sarana dan prasarana modern yang ada cukup membantu dalam administrasi perpajakan.

9. Kode Etik Pegawai DJP

Tabel 4.22 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Kode Etik Pegawai DJP.

Tabel 4.22

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Kode Etik Pegawai

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
17	pegawai pajak pada KPP ini telah melakukannya sesuai dengan kode etik yang ada	F	7	29	45	18	1	323	500	64,60
		%	7,0	29,0	45,0	18,0	1,0			

18	Pegawai pajak pada KPP ini, melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik pegawai DJP yang ada	F	16	44	25	13	2	359	500	71,80
		%	16,0	44,0	25,0	13,0	2,0			
	Total Indikator							**682**	**1000**	**68,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa kode etik pegawai DJP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 68,20 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.22 diatas.

a) Pegawai Pajak pada KPP telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang ada

   Pada tabel 4.22 untuk pernyataan "Pegawai Pajak pada KPP telah melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang ada" terlihat paling banyak responden menjawab cukup menjadi cukup sesuai (skor 3), disusul responden yang menjawab sudah sesuai (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 64,60 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai pegawai pajak KPP cimahi melakukan pekerjaannya cukup sesuai dengan kode etik.

b) Pegawai Pajak pada KPP telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik DJP yang ada

   Pada tabel 4.22 untuk pernyataan "Pegawai Pajak pada KPP telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik DJP yang ada" terlihat paling banyak

responden menjawab setuju (skor 4), disusul responden yang menjawab cukup setuju (skor 3). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 71,80 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai setuju bahwa pegawai pajak KPP cimahi melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik DJP.

10. Komitmen Pegawai

Tabel 4.23 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator Komitmen Pegawai.

Tabel 4.23

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Komitmen Pegawai

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Sikap pegawai pajak	F	17	37	24	21	1	348	500	69,60
		%	17,0	37,0	24,0	21,0	1,0			
20	pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak mempengaruhi tingkat kepercayaan	F	30	24	25	12	9	354	500	70,80
		%	30,0	24,0	25,0	12,0	9,0			
	Total Indikator							**702**	**1000**	**70,20**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi masih cukup baik. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 67,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.23 diatas.

a) Metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern

   Pada tabel 4.23 untuk pernyataan "Setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern, bagaimana metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada" terlihat paling banyak responden menjawab menjadi tidak baik (skor 2), disusul responden yang menjawab menjadi sangat baik (skor 5). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 68,20 berada pada interval 68 – 84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada menjadi lebih baik setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern.

b) Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap administrasi perpajakan

   Pada tabel 4.23 untuk pernyataan "apakah perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan berpengaruh terhadap administrasi perpajakan" terlihat paling banyak responden menjawab biasa saja (skor 3), disusul responden yang menjawab cukup berpengaruh (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 66,20 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori kuirang, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi pada umumnya menilai perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan cukup berpengaruh terhadap administrasi perpajakan.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan.

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.24
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

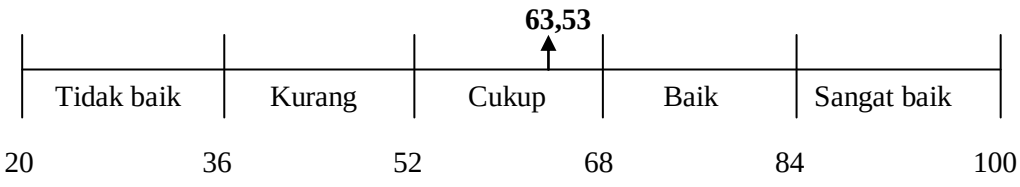
Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Tepat Waktu Dalam Penyampaian SPT	623	1000	62,30
Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak	665	1000	66,50
Tepat Waktu Dalam Melapor Pajak	618	1000	61,80
Total	**1906**	**3000**	**63,53**

(Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.24 di atas tersebut di interpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3

Skala Penafsiran Persentase Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber: Umi Narimawati (2007:84)

Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan re sponden pada variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 63,53 berada di antara interval 52 – 68. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi secara umum berada dalam kategori cukup. Demikian juga bila dilihat berdasarkan indikator, tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada ketiga indikator termasuk dalam kategori cukup.

Agar lebih jelas penulis juga menyajikan gambaran kepatuhan Wajib Pajak pada masing-masing butir pernyataan, yang diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. Tepat Waktu Dalam Penyampaian SPT

Tabel 4.25 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tepat waktu dalam penyampaian SPT.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tepat Waktu Dalam Penyampaian SPT

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Tanggal berapa biasanya Ibu/Bapak menyampaikan atau melaporkan SPT masa	F	6	15	39	35	5	282	500	56,40
		%	6,0	15,0	39,0	35,0	5,0			
2	Setiap wajib pajak seharusnya menyampaikan SPT tepat waktu untuk menghindari denda	F	12	36	34	17	1	341	500	68,20
		%	12,0	36,0	34,0	17,0	1,0			
	Total Indikator							**623**	**1000**	**62,30**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa cukup tepat waktu Wajib Pajak dalam penyampaian SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 56,40 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.25 diatas.

a) Tepat waktu dalam penyampaian SPT

   Pada tabel 4.25 untuk pernyataan "Tanggal berapa biasanya Ibu/Bapak menyampaikan atau melaporkan SPT masa" terlihat paling banyak responden menjawab tepat saat jatuh tempo (skor 3), disusul responden yang menjawab beberapa hari setelah jatuh tempo(skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 56,40 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi cukup baik tepat waktu dapat penyampaian atau pelaporan SPT masa.

b) Menyampaikan SPT Tepat waktu untuk menghindari denda

   Pada tabel 4.25 untuk pernyataan "Setiap wajib pajak seharusnya menyampaikan SPT tepat waktu untuk menghindari denda" terlihat paling banyak responden menjawab ragu-ragu (skor 3), disusul responden yang menjawab setuju (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 58,40 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi merasa cukup setuju penyampaian SPT tepat waktu untuk menghindari denda.

2. Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak

Tabel 4.26 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tepat waktu dalam membayar pajak.

Tabel 4.26

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT	F	20	31	33	13	3	352	500	70,40
		%	20,0	31,0	33,0	13,0	3,0			
4	saat kapan biasanya Ibu/Bapak membayar pajak	F	22	18	19	33	8	313	500	62,60
		%	22,0	18,0	19,0	33,0	8,0			
	Total Indikator							**665**	**1000**	**66,50**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa cukup tepat waktu Wajib Pajak dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 66,50 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.26 diatas.

a) Ketetapan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT

Pada tabel 4.26 untuk pernyataan "Ketetepan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT" terlihat paling banyak responden menjawab jarang tepat waktu (skor 3), disusul responden yang menjawab sering tepat waktu (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 70,40 berada pada interval 68-84 dan termasuk dalam kategori baik, artinya Wajib Pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi cukup tepat waktu dapat penyampaian atau pelaporan SPT masa.

b) Membayar pajak

Pada tabel 4.26 untuk pernyataan "Saat kapan membayar pajak" terlihat paling banyak responden menjawab Beberapa hari setelah tanggal jatuh tempo (skor 2), disusul responden yang menjawab jauh sebelum tanggal jatuh tempo (skor 5). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 62,60 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi cukup tepat waktu dalam membayar pajak.

3. Tepat Waktu Dalam Melapor Pajak

Tabel 4.27 berikut menunjukkan distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tepat waktu dalam melapor pajak.

Tabel 4.27

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Tepat Waktu Dalam Melapor Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Kendala yang sering dihadapi ketika Ibu/Bapak akan membayar pajak	F	13	21	32	29	5	308	500	61,60
		%	13,0	21,0	32,0	29,0	5,0			
6	Malas merupakan salah satu faktor keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya	F	5	33	34	23	5	310	500	62,00
		%	5,0	33,0	34,0	23,0	5,0			
	Total Indikator							**618**	**1000**	**61,80**

Melalui akumulasi jawaban responden pada total indikator dapat diketahui bahwa cukup tepat waktu Wajib Pajak dalam membayar pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Hal ini bisa diketahui dari persentase akumulasi skor jawaban responden sebesar 66,50 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup. Berikut ini adalah uraian tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat pada tabel 4.27 diatas.

a) Kendala dalam membayar pajak

   Pada tabel 4.27 untuk pernyataan "kendala yang dihadapi saat membayar pajak" terlihat paling banyak responden menjawab tidak pecaya kepada aparat pajak (skor 3), disusul responden yang menjawab malas (skor 2). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 61,60 berada pada interval 52-68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi merasa malas membayar pajak karena tidak percaya kepada aparat pajak.

b) Malas merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam melaporkan pajak

   Pada tabel 4.27 untuk pernyataan "Malas merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam melaporkan pajak" terlihat paling banyak responden menjawab ragu-ragu (skor 3), disusul responden yang menjawab setuju (skor 4). Kemudian persentase skor tanggapan responden sebesar 62,00 berada pada interval 52 – 68 dan termasuk dalam kategori cukup, artinya Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi merasa setuju malas merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam melaporkan pajak.

4.1.4 Analisis Verifikatif

Pada sub bab ini hipotesis penelitian yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. Hipotesis penelitian seperti

yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari variabel *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Namun karena data hasil tanggapan responden masih berbentuk ordinal, maka sebelum diolah menggunakan analisis regresi terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi data interval melalui *methods of succesuve interval*.

4.1.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi diuji dan dianalisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normlitas, uji multikolinieritas (untuk regresi linear berganda), dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ketiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut harus diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

1) Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

Normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi dan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut.

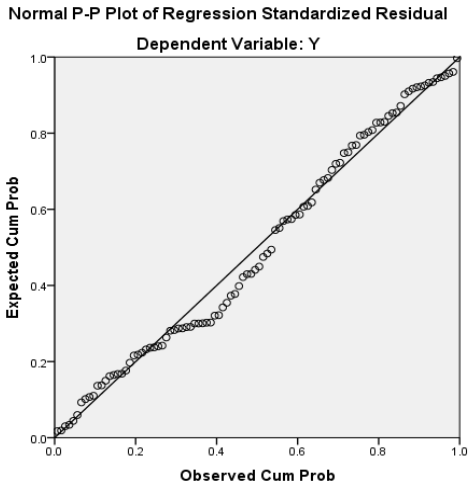
Tabel 4.28
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.41392466
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.046
Kolmogorov-Smirnov Z		.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Pada tabel 4.28 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,394. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normalitas dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut



Gambar 4.4
Grafik normalitas

Pada grafik diatas dapat dilihat titik-titik nilai residual masing-masing data menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa model regresi berdistribusi normal.

2) Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.29 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel independen dengan nilai absolut residual (error).

Tabel 4.29
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.088
		Sig. (2-tailed)	.384
		N	100
	X2	Correlation Coefficient	.051
		Sig. (2-tailed)	.613
		N	100

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.29 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari koefisien korelasi masing-masing variabel

independen dengan nilai absolut residual (0,384 dan 0,613) masih lebih besar dari 0,05.

3) Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.30

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.934	1.071
	X2	.934	1.071

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.30 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen. Hal ini terlihat dari nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.

4.1.4.2 Hasil Estimasi Model Regresi

Pada bagian ini akan diestimasi persamaan regresi pengaruh *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data hasil konversi skor hasil tanggapan 100 responden.

Bentuk model persamaan regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X_1 = *Self assesment system*
X_2 = Sistem administrasi perpajakan modern
b_0 = konstanta

bi = koefisien regresi variabel Xi
ε = Pengaruh faktor lain

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (*self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan). Berdasarkan hasil pengolahan data *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di peroleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.31
Koefisien Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.426	.347		-1.229	.222

X1	.569	.082	.498	6.930	.000
X2	.532	.091	.420	5.850	.000

a. Dependent Variable: Y

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.31 maka dapat dibentuk model prediksi variabel *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan terhadap total kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut.

$$\hat{Y} = -0{,}426 + 0{,}569X_1 + 0{,}532\ X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dilihat koefisien regresi dari kedua variabel independen bernilai positif. Koefisien *self assesment system* bernilai positif menunjukkan bahwa *self assesment system* yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian koefisien sistem administrasi perpajakan juga positif menunjukkan bahwa semakin jelas sistem administrasi perpajakan modern akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.4.3 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

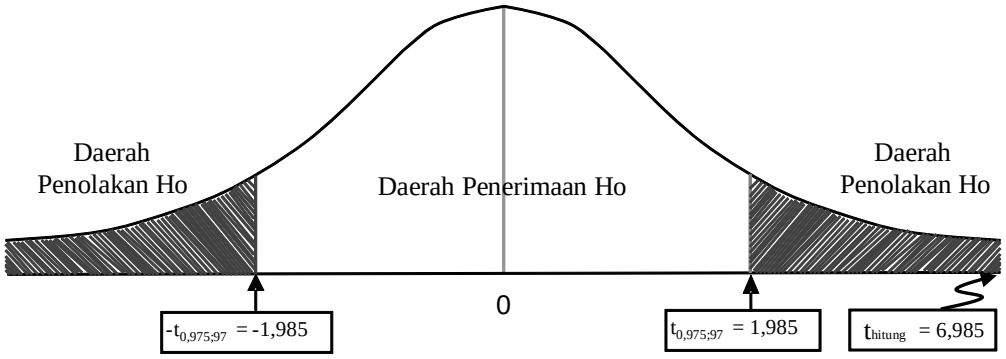
Dugaan sementara *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$Ho_1.\beta_1 = 0$: *Self assesment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

$Ha_1.\beta_1 \neq 0$: *Self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.31 diperoleh nilai t_{hitung} variabel *self assesment system* sebesar 6,930 dengan nilai signifikansi < 0,001. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji

parsial (uji t) sebesar 1,985 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 97 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (6,930) lebih besar dari t_{tabel} (1,985) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_1 sehingga Ha_1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.5
Daerah penerimaan dan penolakan Ho pada uji pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 6,985 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa *self assesment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan hubungan *self assesment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak dihitung korelasi parsial. Melalui korelasi parsial juga akan dicari besar pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi parsial antara *self assesment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.32

Koefisien Korelasi Parsial *Self assesment system* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			Y	X1
X2	Y	Correlation	1.000	.575
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	97
	X1	Correlation	.575	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	97	0

Korelasi parsial antara *self assesment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika sistem administrasi perpajakan tidak berubah adalah sebesar 0,575 dengan arah positif. Artinya *self assesment system* memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika sistem administrasi perpajakan tidak mengalami perubahan. Kemudian besar pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung melalui koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika sistem administrasi perpajakan tidak berubah adalah:

$Kd = (0{,}575)^2 \times 100\% = 33{,}1\%$.

Jadi *self assesment system* memberikan pengaruh sebesar 33,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

4.1.4.4 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

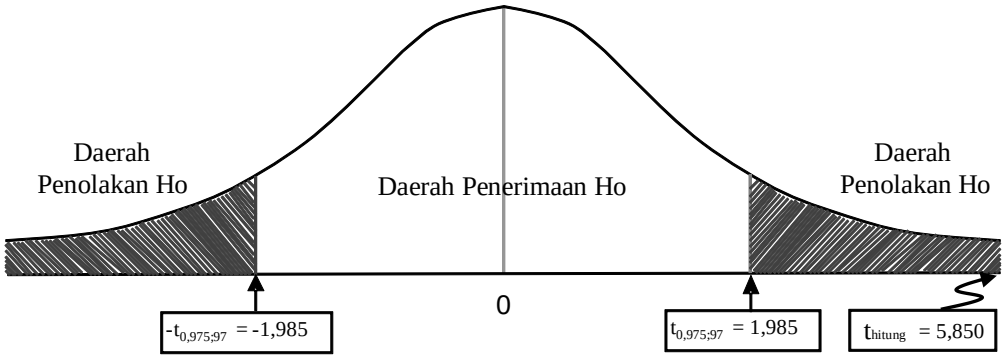
Dugaan sementara sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$Ho_2.\beta_2 = 0$: Sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

$Ha_2.\beta_2 \neq 0$: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Dari keluaran software SPSS diperoleh nilai t_{hitung} variabel sistem administrasi perpajakan sebesar 5,850 dengan nilai signifikasi < 0,001. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,985 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 97 untuk pengujian dua pihak. Karena nilai t_{hitung} (5,850) lebih besar dari t_{tabel} (1,985) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho_2 sehingga Ha_2 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.6
Daerah penerimaan dan penolakan Ho pada uji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern

Pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 5,850 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Selanjutnya untuk mengetahui kekuatan hubungan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan Wajib Pajak dihitung korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.33

Koefisien Korelasi Parsial Sistem administrasi perpajakan modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

Control Variables			Y	X2
X1	Y	Correlation	1.000	.511
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	97
	X2	Correlation	.511	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	97	0

Hubungan antara sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika *self assesment system* tidak berubah adalah sebesar 0,511 dengan arah positif. Artinya sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak ketika *self assesment system* tidak mengalami perubahan. Kemudian besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung melalui koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial sistem administrasi perpajakan

modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak ketika *self assesment system* tidak berubah adalah:

Kd = $(0,511)^2 \times 100\%$ = 26,1%. Jadi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh atau kontribusi masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel independen, sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dibanding *self assesment system*.

4.1.4.5 Pengaruh *Self Assesment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selanjutnya untuk menguji apakah *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan uji signifikansi dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho_3 : Semua $\beta i = 0$ i = 1&2	*Self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
Ha_3 : Ada $\beta i \neq 0$ i = 1&2	*Self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.34 di bawah ini:

Tabel 4.34

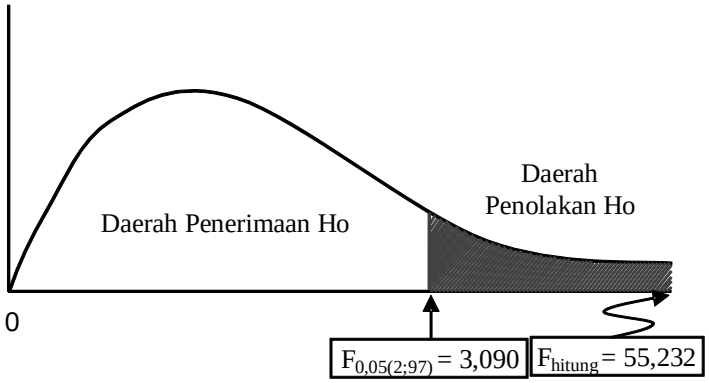
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.316	2	9.658	55.232	.000[b]
	Residual	16.962	97	.175		
	Total	36.278	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai F_{hitung} hasil pengolahan data sebesar 55,232 dengan nilai signifikansi < 0,001. Selanjutnya nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Melalui tabel F pada tingkat kekeliruan 5% (α = 0.05) dan derajat bebas (2:97) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,090. Karena F_{hitung} (55,232) lebih besar dari F_{tabel} (3,090) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho_3 sehingga Ha_3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh pengaruh *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Bersama-sama

Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat F_{hitung} sebesar 55,232 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Selanjutnya besar pengaruh *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak dihitung koefisien determinasi dan dari hasil pengolahan menggunakan SPSS 20 diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 4.35
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730[a]	.532	.523	.41817

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Nilai R (0,730) pada tabel 4.35 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (*self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan) secara simultan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi pada permasalahan yang

sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel bebas (*self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern) memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Kemudian nilai R-Square sebesar 0,532 atau 53,2 persen, menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari *self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak sebesar 53,2 persen. Artinya secara bersama-sama kedua variabel independen (*self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 53,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 46,8%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen yang diteliti seperti tarif pajak, sanksi pajak, penagihan pajak, dan lainnya dapat juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, akan dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan fenomena mengenai *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Agus Matowardojo (2012) mengatakan masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan *self assessment* dalam pembayaran pajak. Penulis meneliti fenomena yang ada**.** Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assesment system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Self Assessment System memberikan pengaruh sebesar 33,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang berarti korelasi yang ada rendah. Sehingga *Self Assessment System* cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Cimahi.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2009) dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan self *assessment system* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis membuktikan bahwa organisasi, penafsiran dan aplikasi memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Namun keberhasilan kebijakan *self assessment* dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang optimal harus dibarengi dengan memperhatikan isi kebijakan self assesment serta system nilai

yang dianut atau yang melekat pada wajib pajak pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Hasil pembahasan yang telah diteliti, *Self Assessment System* cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi. Aturan *Self Assessment System* dalam administrasi perpajakan malah membuat Wajib Pajak kurang mematuhi aturan-aturan yang ada dalam *Self Assessment System* itu. Maka dari itu, agar wajib pajak patuh terhadap aturan-aturan yang ada disarankan supaya lebih dipermudah segala prosedur yang ada, prosedur untuk mendaftar, melapor, membayar. Sehingga wajib pajak tidak malas dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuat wajib pajak menjadi patuh. Hal ini akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, dan banyak wajib pajak terdaftar, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengerti dalam perhitungan jumlah pajak terutang, dan masih kurangnya kesadaran dalam melapor dan membayar pajak, maka untuk mencapai semua itu pegawai pajak harus memberikan teguran kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam melapor dan membayar pajak, selain itu juga memberikan pelayanan / sosialisasi yang

lebih baik lagi kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengerti tentang cara menghitung jumlah pajak dan tata cara perpajakan yang baik dan benar.

4.2.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan fenomena mengenai Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Mayun (2009) mengatakan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, tambahnya, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap Kepa tuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang berarti korelasi rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina (2011) yang berdasarkan hasil analisis mengemukakan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Hasil penelitian yang dilakukan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari fenomena, komplain tentang pelayanan oleh pegawai pajak, menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang ada. Maka dari itu, harus dilakukan pembenahan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang ada, mulai dari pelayanan, sehingga wajib pajak tidak malas untuk mengurusi administrasi perpajakan yang ada. Pelayanan yang baik dapat berpengaruh, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pegawai pajak agar mempermudah prosedur administrasi perpajakan yang ada.

4.2.3 Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara bersama-sama kedua variabel independen (*self assesment system* dan sistem administrasi perpajakan modern) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 53,2% terhadap kepatuhan

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Sehingga dapat diartikan kedua variabel memiliki korelasi sedang.

Dilihat dari fenomena yang ada, yang dikemukakan oleh Fuad Rahmany (2011) saat ini masih banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Berdasarkan teori yang ada yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dan masih dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan terlihat dalam pembahasan ini, dapat diketahui bahwa kedua variabel independen yang diteliti yaitu *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern cukup mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi. Sehingga agar lebih baik lagi Kepatuhan Wajib Pajaknya, diperlukan kerjasama antara pegawai pajak dan wajib pajak dalam administrasi perpajakan, agar wajib pajak mematuhi ketentuan dan aturan-aturan yang ada mengenai perpajakan. Berdasarkan hasil yang telah diteliti, pengaruh secara simultan lebih besar daripada parsial, maka sebaiknya penerapan self assessment system dilakukan bersamaan dengan diterapkannya Sistem Administrasi

Perpajakan Modern, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.